

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat
dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama



Disusun oleh :

NAMA : Angga Dwi Permadi

NPM : 01.09.432

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA

Terakreditasi (*Accredited*)

SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT)

Nomor : 014/BAN-PT/AK-XII/S1/VI/2009

Tanggal 12 Juni 2009

BANDUNG

2013

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun Oleh :

Nama : Angga Dwi Permadi

NPM : 01.09.U432

Menyetujui

Pembimbing,

Prof.Dr.Karhi Nisjar S,S.E.M.M.Si., Ak.

NIP. 100002924

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr.H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak.

NIP.195. 512. 181. 986. 011. 001

Erly Sherlita S.E., M.Si., Ak.

NIP.1111199056

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Angga Dwi Permadi

NRP : 0109U432

Tempat, Tanggal Lahir : Rancakek, 29 Oktober 1991

Menerangkan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “ (Studi Kasus di Dinas Provinsi Jawa Barat). Merupakan hasil pekerjaan saya sendiri. Apabila terbukti skripsi tersebut bukan hasil pekerjaan sendiri, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang telah ditetapkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya dan benar adanya.

Bandung, 2013

Penulis

Angga Dwi Permadi

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung Tahun 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan atau staff yang berada di Dinas Bina Marga di Kota Bandung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuisisioner) yang disebar kepada responden atau karyawan di Dinas Bina Marga di kota Bandung. Dari total 30 kuisisioner yang disebar, hanya 25 kuisisioner dari responden yang kembali dan dapat diolah.

Teknik pemilihan sampel yaitu *non probability sampling*. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi *rank spearman* pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19.00*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi *rank spearman* menunjukkan nilai koefisien korelasi *rank spearman* sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$, serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 25.6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk hasil perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , menunjukkan hasil t_{hitung} sebesar 2,818 dan t_{tabel} sebesar 2,068. Dari hasil pengujian tersebut $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,818 > 2,068$ yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Case Study In Dinas Bina Marga Provincy Jawa Barat Year 2013)

This study aimed to determine the effect of the application of financial accounting systems of local governments to the quality of local government financial reports. The dependent variable in this study is the quality of local government financial statements, while the independent variable in this study is the accounting system of local government finance.

The population in this study are employees or staff who are in the Department of Highways in Bandung. The data used in this study is a questionnaire data (questionnaires) were distributed to the respondents or employees in the Department of Highways in the city of Bandung. Of the total 30 questionnaires were distributed, only 25 questionnaires from respondents who returned and processed.

Sample selection technique that is non-probability sampling. While the methods of analysis used in this study is the Spearman rank correlation analysis koefisien at a significance level of 5%. Programs used in analyzing the data using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19:00.

Based on the results of hypothesis testing using Spearman rank correlation analysis showed korelasir Spearman rank coefficient of 0.506, the value of this coefficient indicates that the value of 0.506 rs have a moderate level of relationship in which the results are between $0.40 < 0.506 < 0.599$, and positive values indicate an increase in the same direction if X then Y rise up or vice versa. other than that the coefficient of determination showed that only 25.6% the quality of local government financial statements are affected by the accounting system keunagan local government, in other words, there are other variables that affect the quality of local government financial statements in the amount of 74.4% outside of the independent variables used in the study Here you are. As for the comparison of results with ttabel tcount, showing the results of 2,818 t and 2,068 ttable. From the results of these tests $t > ttbael$ ie $2.818 > 2.068$ which means H_a H_o is rejected or accepted. In other words, based on hypothesis testing shows that the implementation of the local government finance accounting system affect the quality of local government financial reports.

Keywords: local government finance accounting system, the quality of local government financial reports.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).” Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini.

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi setiap umatnya.
3. Agus Taufik dan Rosmini selaku orang tua tercinta yang selama ini telah memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak akan tergantikan oleh apapun.
4. Agung Permana dan Amie Chaerunnisa selaku kakak, Agan Rachmadi dan Anggia Permatasari selaku adik, terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya.
5. Bapak Prof.Dr. H. Karhi Nisjar S, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan doa, dukungan, pengarahan, dorongan, masukan selama masa bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si.,Ak. selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian.
7. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Widyatama.
8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
9. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
10. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama Bandung.
11. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama.
12. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama.
13. Rizqia Sofiarani Sofian dan Orang Tua yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, semangat, kasih sayang dan lain-lain sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Hery Perwiradinata, Alan Ramdhani, Hani Ismayanti, Dini Nur Harini, Alyssa Regina, Hendra Rahma Wiguna, Adi Riyana, Winda Janurissa,

Mega Dewi Khasanah, Restu Tri Nurshinta, yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas peralatan, masukan, serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

15. Semua teman-teman GSG Angkatan '09 Ahmed Furqon, Sahid Adli, Muhammad Amri, Gilang Satria Putra (bugil), Ferry Febrian, Ryan Haris, Teja Piqri, Okke Heriadi, Fadli Kun, Panca Lukita, Garry Gumilar (gargum), Agung Sonjaya (demit), Alwin, Handy (Ndiw), Dio Anggriawan, Juri, Hilmy , Aditya Yudisthira (Mas), Imam Hilman, M Rezky, Irfan D Prasetyo (Ustad), Afif Birul, Rio Indra, Andri (ndrew), Anshory R (anshor), Arizali Aufar (jail), Budi Fahreza (maskas), Donli Rega, Ganesha Dandy, Iqbal Dewantara (ibenk), M Syaepullah (epul), Iman Setiawan, Rahadian (omz), Viekar Muhammad, Samuel Simanjuntak (lae) dan lain-lain terima kasih atas dukungannya kepada penulis .
16. Seluruh teman-teman rumah yang selalu memberikan advice dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
17. Anak-anak kelas J yang sudah lulus dan yang masih tersisa ayo semangat.
18. Rekan-rekan Akuntansi 2009.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandung, Juni 2013

Penulis,

Angga Dwi Permadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian.....	11
2.1.1 Sistem	11
2.1.2 Akuntansi	12
2.1.2.1 Definisi Akuntansi.....	12
2.1.2.2 Sistem Akuntansi.....	14
2.1.3 Akuntansi Pemerintahan	15
2.1.3.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan.....	15
2.1.3.2 Karakteristik Organisasi Pemerintahan	16
2.1.3.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	18
2.1.3.4 Tujuan Akuntansi Pemerintahan.....	19
2.1.4 Sistem Akuntansi Pemerintahan.....	20
2.1.4.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.....	22
2.1.4.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.....	23
2.1.4.3 Prosedur Akuntansi Aset.....	24
2.1.4.4 Prosedur Akuntansi Selain kas.....	25

2.1.5	Sistem dan Prosedur Pencatatan	26
2.1.5.1	Sistem Pencatatan.....	26
2.1.5.2	Prosedur Pencatatan	28
2.1.6	Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi.....	30
2.1.7	Penyajian Laporan Keuangan.....	32
2.1.8	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	33
2.1.9	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.1.9.1	Definisi dan Konsep Laporan Keuangan	34
2.1.9.2	Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37
2.1.9.3	Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	39
2.1.9.4	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	44
2.1.9.5	Kendala Informasi yang Relevan dan Andal....	47
2.1.10	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	49
2.2	Kerangka Pemikiran.....	50
2.2.1	Review Penelitian Terdahulu.....	51
2.3	Hipotesis Penelitian.....	58
BAB III	METODE PENELITIAN	59
3.1	Objek Penelitian	59
3.1.1	Sejarah Singkat Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	59
3.1.2	Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat..	60
3.1.3	Struktur dan Deskripsi Dinas Bina Marga di Provinsi Jawa Barat.....	62
3.1.3.1	Struktur Organisasi	62
3.1.3.2	Deskripsi Jabatan Kepala Dinas , Sekretaris ,	

	Bidang Teknik, Bidang Pembangunan, Bidang Pemeliharaan, dan Penanganan Bencana Alam dan Bidang Pengawasan Pemanfaatan	63
3.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.....	66
3.2	Populasi Dan Sampel Penelitian	67
3.2.1	Populasi Penelitian	67
3.2.2	Sampel Penelitian	68
3.3	Metode Penelitian.....	69
3.3.1	Desain Penelitian	69
3.3.2	Metode Pengumpulan Data	70
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	70
3.4.1	Variabel Independen	70
3.4.2	Variabel dependen.....	71
3.5	Metode Analisis Data.....	73
3.5.1	Uji Validitas	73
3.5.2	Uji Reliabilitas.....	75
3.6	Pengujian Hipotesis.....	77
3.6.1	Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman	77
3.6.2	Analisis Koefisien Determinasi	79
3.6.3	Pengujian Hipotesis.....	80
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
4.1	Hasil Penelitian	82
4.1.1	Gambaran Umum Responden	82
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	84
4.1.2.1	Gambaran Mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	84
4.1.2.2	Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan	92
4.1.3	Analisis Jawaban Responden	95
4.1.4	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	96
4.1.4.1	Hasil Pengujian Validitas	97

4.1.4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	98
4.1.4.2.1 Reliabilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	99
4.1.4.2.2 Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	99
4.1.5 Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman	100
4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi	100
4.1.7 Pengujian Hipotesis.....	101
4.2 Pembahasan	102
4.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Di Dinas Bina Marga	103
4.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Bina Marga	106
4.2.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	108
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	111
5.1 a) Simpulan	111
b) Keterbatasan.....	113
5.2 Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2004-2010	6
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	72
Tabel 3.2	Koefisien Korelasi dan Taksiran.	79
Tabel 4.1	Profil Responden dan Hasil Penyebaran Kuisioner	83
Tabel 4.2	Kelompok Responden Berdasarkan Masa Kerja	83
Tabel 4.3	Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	83
Tabel 4.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Usia	84
Tabel 4.5	Gambaran Mengenai Keseuaian Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	85
Tabel 4.6	Gambaran Mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi dengan Standar Pencatatan Akuntansi yang Berlaku Umum.	87
Tabel 4.7	Gambaran Mengenai Pembuatan Laporan keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik.	90
Tabel 4.8	Gambaran Mengenai Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami.	92
Tabel 4.9	Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah .	97
Tabel 4.10	Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	98
Tabel 4.11	Realibilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.	99
Tabel 4.12	Realibilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	99
Tabel 4.13	Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	57
Gambar 2.2 Paradigma Kerangka Pemikiran.....	58
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	62
Gambar 4.1 Garis Kontinum mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	86
Gambar 4.2 Garis Kontinum mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan Akuntansi yang Berlaku Umum	88
Gambar 4.3 Garis Kontinum mengenai pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik.....	91
Gambar 4.4 Garis Kontinum mengenai Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Survey

Lampiran 2 – Surat Perizinan Dinas Bina Marga

Lampiran 3 – Kuisoner

Lampiran 4 – Hasil Tabulasi

Lampiran 5 – Output SPSS

Lampiran 6 – Kartu Bimbingan

Lampiran 7 – Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 8 – Surat Revisi Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era reformasi ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governance* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintahan yang menuntut beragam pengelolaan tentang pemerintahan yang baik.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001 melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak terhenti sampai di situ selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh

pemerintah salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), Rohman menjelaskan dalam Modul LAN 2000 bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh (Lembaga Administrasi Negara, 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan menerbitkan perangkat / peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara / daerah.

Hal di atas diperkuat dengan telah dilakukannya reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan (Fajar, 2010).

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung

informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Menurut Jones and pendlebury, akuntansi keuangan adalah : *Financial accounting techniques have traditionally been concerned with the stewardship function, narrowly defined. The financial reports provide a picture of the resources entrusted, how the resources were employed during the year, and in what form the resources are now held. The emphasis has always been on producing verifiable statements of income and expenditure, balance sheets and latterly cash flow.*

Artinya adalah teknik keuangan akuntan secara alami telah mendapat perhatian oleh fungsi pelayanan khusus. Laporan keuangan menghasilkan gambaran penelitian yang dipercaya. Bagaimana penelitian itu bekerja dalam setahun, dan dalam bentuk apa penelitian itu berlangsung sekarang. Tekanan selalu menuai pernyataan mengenai penghasilan dan pengeluaran, neraca dan arus kas nantinya.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Pada aplikasinya di dalam pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan yang di susun dalam bentuk prinsip- prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Jika sistem akuntansi di Indonesia di tingkat pusat diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak member opini atau tidak member pendapat (*Disclaimer*). Ketika Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berarti Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh pihak Daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan

sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 (<http://www.bpk.go.id>) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 menggambarkan kenaikan dari hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Namun Badan Pemeriksa Keuangan masih banyak menemukan kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Roviyantie, 2011).

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tujuh tahun, dari tahun 2004-2010, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam presentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1

TABEL 1.1
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2004-2010

Tahun	Opini								Σ
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2004	21	7,32	249	86,76	10	3,48	7	2,44	287
2005	17	4,70	308	85,08	12	3,31	25	6,91	362
2006	3	0,65	326	70,41	28	6,05	106	22,89	463
2007	4	1	283	60	59	13	123	26	469
2008	13	3	323	67	31	6	118	24	485
2009	15	4	330	66	48	10	106	21	499
2010	32	9	271	76	12	3	43	12	358*

*)Sampai dengan semester 1 2011 (sumber: www.bpk.go.id)

Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Tidak Wajar dan Tidak Memperoleh Opini memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini Tidak Wajar dan Tidak Memperoleh Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan efektivitas Sistem Pelaporan Informasi pemerintah daerah belum optimal. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang

memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan (Harto, 2010).

Hal ini diperburuk karena anggaran yang dikelola merupakan anggaran publik dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Di lain pihak keadaan seperti ini merupakan suatu tugas dan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2006).

Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya penelitian tersebut mengatakan adanya hubungan dan pengaruh positif antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan sebesar 78,3%.

(Fajar, 2010).

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas selain berbeda pada terletak pada objek yang diteliti, waktu dan tempat yang berbeda.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**. (Penelitian pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan latar belakang masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Dina Marga Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian memiliki 3 tujuan yaitu :

1. Tujuan Pertama adalah untuk menggambarkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
2. Tujuan Kedua adalah untuk menggambarkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
3. Tujuan Ketiga adalah untuk menguji dan membuktikan Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dan akademis.

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kualitas laporan keuangan.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Dinas Bina marga Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dan waktu pelaksanaan dimulai sejak bulan Maret 2013 sampai bulan Juni 2013.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian

2.1.1 Sistem

Sistem diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan bersama-sama oleh berbagai unsur. Menurut Robert dan Vijay (2005:7), pengertian sistem adalah sebagai berikut:

“Sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas”.

Sementara itu, Romney dan Steinhart (2006:2) menyatakan bahwa pengertian sistem adalah sebagai berikut:

"Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan".

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen, cara tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.

2.1.2 Akuntansi

2.1.2.1 Definisi Akuntansi

Ada beberapa pengertian akuntansi yang diungkapkan oleh penulis, dalam penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi pemerintah diantaranya adalah *accounting principles board* seperti yang di ungkapkan dalam Abdul Halim (2002 : 32) bahwa akuntansi diartikan sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan menurut *Comite of Terminology of the Accounting Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam Harahap (2008:5) ialah

“accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactitions and events which are, in part at least, of a financial character and interpreting the result there of.”

Artinya adalah akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan

kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Weygant, et all. (2005:4) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic event of an organization to interest users”.

Adanya kriteria bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi adalah informasi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi wajib menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi.

Sugiyanto (1995) mengatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga bidang utama yaitu, akuntansi komersial (commercial accounting), akuntansi pemerintahan (government accounting), dan akuntansi sosial (social accounting). Dalam akuntansi komersial data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bagi perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan data yang digunakan untuk memberikan informasi ekonomi dan keuangan pemerintah baik daerah maupun pusat kepada pihak, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Sementara akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi dimana membahas tentang neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional serta neraca nasional yang diterapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi.

Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi yaitu tahap pencatatan. Sedangkan dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan.

2.1.2.2 Sistem Akuntansi

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan” (Mulyadi, 2001:3).

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001) menyatakan bahwa:

“Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur pula”.

Alam S. (2004:8) mendefinisikan Sistem Akuntansi sebagai berikut,

“Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen”.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan manajemen.

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan

2.1.3.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara organisasi akuntansi, domain publik antara lain meliputi pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya.

Alam S. (2004:2) mengungkapkan bahwa “akuntansi merupakan bahasa bisnis. Bahasa ini diterjemahkan ke dalam suatu sistem informasi yang memberikan informasi penting mengenai aktivitas keuangan suatu organisasi (termasuk perusahaan), sebagai bahan untuk pengambilan keputusan”.

Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim (2012: 43) didefinisikan sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sedangkan menurut Government Accounting Standard Board 1987 seperti yang dikutip Freeman (1998 : 36), pengertian akuntansi pemerintahan adalah :

“Government accounting is an integral of the accounting discipline. It is founded on the basic concept underlying the accounting discipline as a whole and shares many characteristics with commercial accounting”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah adalah suatu kesatuan dari ilmu akuntansi yang bersandar pada konsep dasar ilmu akuntansi

secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi komersial.

Tanjung (2009:35) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah

“Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Indra Bastian (2006:15) Mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai,

“mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik”

Dari definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah yang memerlukan.

2.1.3.2 Karakteristik Organisasi Pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2002:8) karakteristik dari organisasi pemerintah atau sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :

1. Tujuan Organisasi

Organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah memiliki tujuan bukan untuk memaksimalkan laba melainkan pemberian pelayanan publik (*public service*) seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, penegak hukum dan sebagainya. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pelayanan

publik bukan berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD) dan juga upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah contoh adanya tujuan finansial pada Organisasi Sektor Publik.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan atau sumber pembiayaan pada sektor publik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, *charging for services*, laba perusahaan milik negara pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, obligasi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Pola Pertanggungjawaban

Pada Organisasi sektor publik, manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*). Pola pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik bersifat vertical dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi sedangkan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan

hierarkis. Struktur organisasi sangat terpengaruh pada politik seperti tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik.

5. Karakteristik Anggaran

Pada organisasi sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan lagi sebagai rahasia negara.

6. Sistem Akuntansi

Organisasi sektor publik menggunakan sistem *cash toward to accrual* artinya ada beberapa akun yang diperlakukan dengan basis kas ada juga sebagian akun yang diperlakukan dengan basis akrual. Namun pada tahun 2015 yang akan datang semua organisasi sektor publik harus sudah menggunakan basis akrual.

2.1.3.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Baldric dan Boni Siregar (2001:9), terdapat dua jenis batasan hukum dan administrasi yang ditekankan pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu:

1. Penggunaan Dana

Dana dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan suatu kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki seperangkat akun yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi

untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain.

2. Peranan Anggaran

Anggaran pada akuntansi pemerintah ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan anggaran dalam organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah terletak pada perencanaannya.

2.1.3.4 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Abdul halim (2007:35) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sementara itu, dalam Peraturan menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232 juncto, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai:

“serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Indra Bastian (2007:98) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem akuntansi Pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
2. Neraca SKPD
3. Catatan atas Laporan keuangan SKPD

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Produser Akuntansi Penerimaan Kas;
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang Milik Daerah; dan
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

2.1.4.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah:

“Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

1. Surat tanda bukti pembayaran;
2. STS;
3. Bukti transfer; dan
4. Nota kredit Bank.

2.1.4.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah:

Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut:

1. SP2D;
2. Nota debet Bank; dan
3. Bukti pengeluaran kas lainnya.

2.1.4.3 Prosedur Akuntansi Aset

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah : “Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD”.

Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang Satuan Kinerja Perangkat Daerah. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan

dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis/nama aset tetap;
2. Kode rekening;
3. Klasifikasi aset tetap;
4. Nilai aset tetap; dan
5. Tanggal transaksi dan/atau kejadian.

2.1.4.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah: “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Berita acara penerimaan barang;
2. Surat keputusan penghapusan barang;
3. Surat keputusan mutasi barang;
4. Berita acara pemusnahan barang;
5. Berita acara serah terima barang;
6. Berita acara penilaian; dan
7. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

2.1.5 Sistem dan Prosedur Pencatatan

2.1.5.1 Sistem Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Abdul halim (2007:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatanya satu kali saja.

Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi

sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah *menjurnal*. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

Dengan menggunakan *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

2.1.5.2 Prosedur Pencatatan

Sedangkan prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan menurut

Nunuy Nur Afiah (2009:48) dibagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. **Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan**

Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi Pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

2. **Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja**

Transaksi belanja di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan dua jurnal.

3. **Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan**

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

4. **Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset**

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang

muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis / nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD.

5. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban

Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang sejenis / nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD.

6. Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana

Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pemda.

2.1.6 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi

Pengertian pengakuan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah:

Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat.

Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan.

Menurut Partono (2001:16), basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan adalah “himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Adapun beberapa basis / dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat.

Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak

banyak serta sederhana (tidak rumit), penerapan basis kas masih dipandang wajar pada saat awal otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu cash basis sudah tidak dapat diterapkan lagi.

2. Basis Akrua

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan.

Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas.

3. Basis Kas Modifikasian

Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. Jadi penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis AkruaI Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.

2.1.7 Penyajian Laporan Keuangan

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, keseuaiannya

dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lainnya yang disyaratkan.

4. Memberikan informasi perancangan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.1.8 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2.1.9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.9.1 Definisi dan Konsep Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7):

“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2002:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan

formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee* (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan mengawasi.

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

3. Investor dan kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmentnya.

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.

5. Analisis ekonomi dan keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik

2.1.9.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.1.9.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan keuangan (caLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara

Umum Negara/Bendahara Umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih. (b) beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.9.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya

Informasi yang relevan adalah:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

- Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.9.5 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Dalam kendala SAP dikatakan bahwa kendala informasi akuntansi dan laporan adalah setiap keadaan dimana ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam informasi akuntansi dan keuangan pemerintah yaitu:

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan agar mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang dihatapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

2.1.10 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaa APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi

pemerintahan daerah yang handal, yang bias dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah; dan
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
5. Penyajian Laporan Keuangan

Oleh karena itu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Sedangkan, Mardiasmo (2004:35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus

memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Menurut Roviyantie (2011) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran.

Sebagaimana sektor swasta pemerintah merupakan sektor publik yang membutuhkan akuntansi, baik untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintah maupun sebagai penyedia informasi keuangan yang berkaitan. Secara organisasi, domain publik, antara lain meliputi badan pemerintahan. Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan terkait dengan perusahaan biasa disebut *akuntansi bisnis*, sedangkan yang terkait dengan usaha nonprofit dikenal dengan *akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik*. Maka dari itu pemerintah daerah merupakan organisasi nonprofit, jadi akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah yakni *akuntansi keuangan*

daerah merupakan bagian dari *akuntansi sektor publik*.

Akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2012: 43), didefinisikan sebagai berikut :

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sedangkan menurut Government Accounting Standard Board 1987 seperti yang dikutip Freeman (1998 : 36), pengertian akuntansi pemerintahan adalah :

“Government accounting is an integral of the accounting discipline. It is founded on the basic concept underlying the accounting discipline as a whole and shares many characteristics with commercial accounting”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah adalah suatu kesatuan dari ilmu akuntansi yang bersandar pada konsep dasar ilmu akuntansi secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi komersial.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah

yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Entitas pelaporan dan Entitas Akuntansi pada pemerintah daerah melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setiap Sistem Keuangan Pemerintah Daerah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut secara periodik yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan kerja perangkat dinas.
2. Neraca Satuan kerja perangkat dinas.
3. Catatan atas Laporan keuangan Satuan kerja perangkat dinas.

Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Dinas, sedangkan. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang milik Daerah; dan
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Berkaitan dengan peraturan menteri dalam negeri dapat disimpulkan bahwa Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja suatu organisasi.

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Laporan keuangan pemerintah ditunjukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya (Peraturan Pemerintah, No.71 Tahun 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah:

“Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Berdasarkan teori diatas menerangkan bahwa kualitas laporan keuangan ialah suatu tolak ukur dari pelaporan informasi akuntansi yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan awal yang diinginkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan ada beberapa indikator dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintahan yang baik , juga dapat menunjang kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah , setiap informasi yang baik dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi 4 syarat sesuai dengan prasyarat normatif yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa yang lampau. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

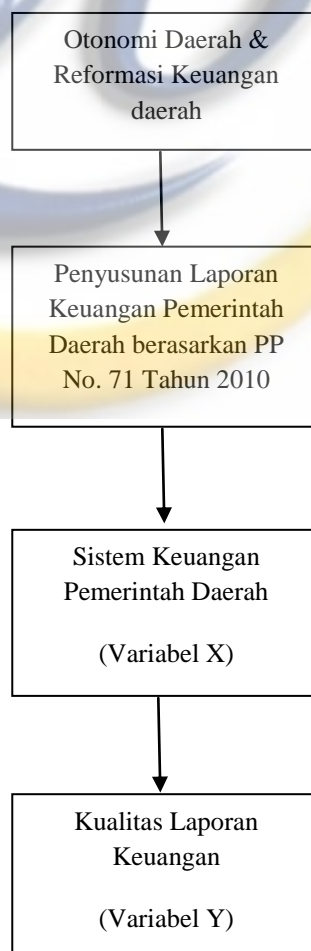
Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan :

1. Relevan berarti informasi keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi terdahulu
2. Andal berarti informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan bebas dari salah saji material dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Dapat dibandingkan berarti informasi keuangan yang di sajikan di periode sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau acuan untuk periode selanjutnya apakah memperbaiki yang buruk maupun yang baik.
4. Dapat dipahami berarti informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami disesuaikan dengan kalangan pengguna yang akan menggunakan informasi

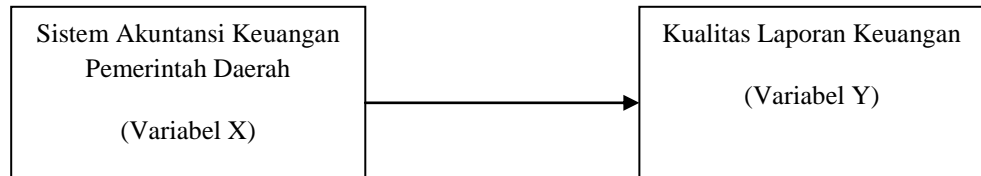
keuangan tersebut.

Dari teori-teori di atas bahwa pemerintah daerah dalam membuat dan melaporkan informasi keuangan daerahnya mengacu pada suatu sistem pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur berbagai pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat menghasilkan output yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami oleh berbagai kalangan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan
Pemerintah
Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 2.2
Paradigma Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Ha: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Definisi objek penelitian menurut Sugiyono (2004) adalah sebagai berikut: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Objek dalam penelitian yang dipilih oleh penulis adalah berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian.

3.1.1 Sejarah singkat Dinas Bina Marga di Provinsi Jawa Barat

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah mengalami beberapa perubahan sampai dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Keberadaan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55). Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang bina marga.

Berdasarkan peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tersebut di atas, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Bina Marga di Provinsi Jawa Barat

1. Visi Misi Dinas Bina Marga di provinsi Jawa Barat

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai bagian integral dari seluruh perangkat instansi yang ada di wilayah Jawa Barat, visi Dinas Bina Marga harus disusun secara selaras vertikal maupun horizontal. Dengan dasar pemikiran tersebut visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat irumuskan sebagai berikut :

“Dengan Profesionalisme Mewujudkan Prasarana Jalan yang Mantap Guna Mendukung Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera”.

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dalam arti penekanan kepada setiap SDM yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepadanya, efisiensi penggunaan dana, sarana, serta waktu yang diperlukan. Profesionalisme perlu selalu ditingkatkan dan dijaga. Untuk itu

diperlukan sumber daya manusia yang berpendidikan, ahli, bermoral, bermental kuat dan bertanggung jawab untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten untuk kepentingan dan pelayanan pada masyarakat.

2. Misi Dinas Bina Marga di provinsi Jawa Bawat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Adapun misi dari Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut :

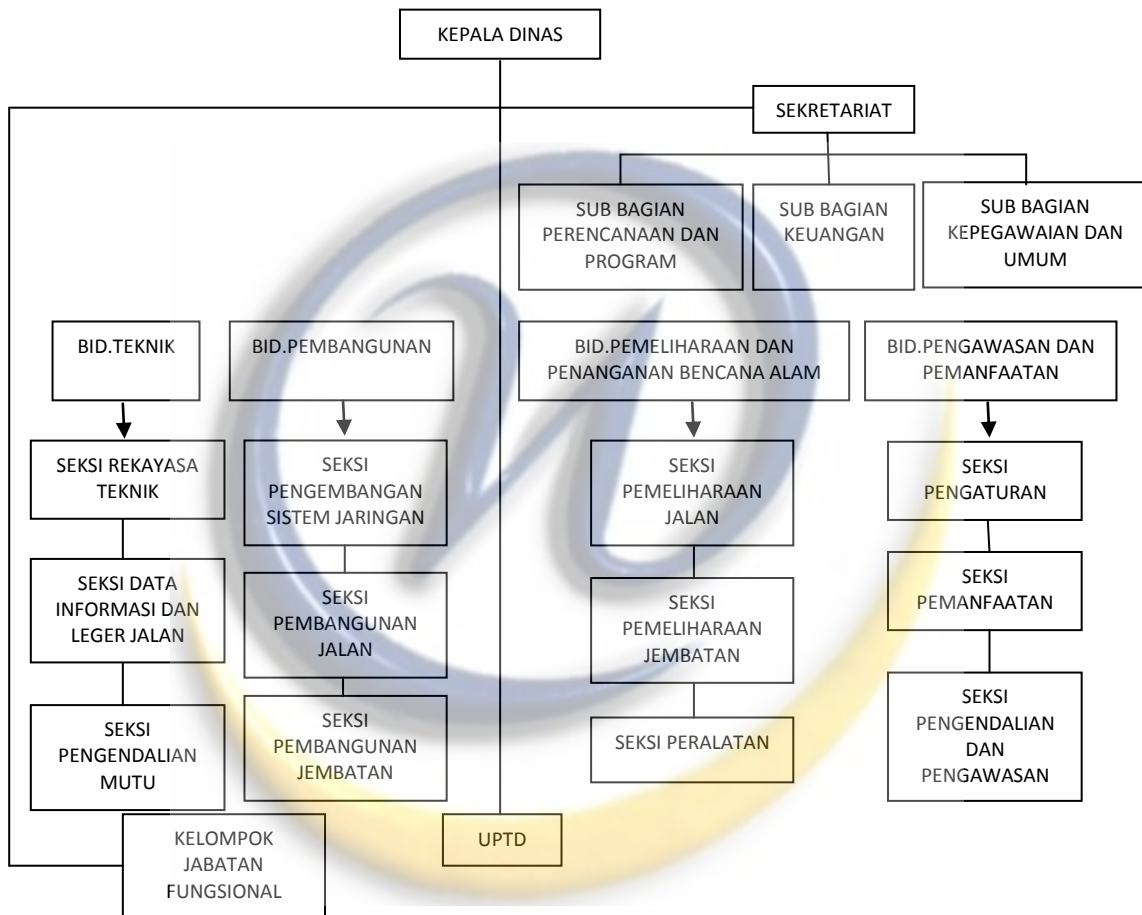
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional
2. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien serta brkesinambungan
3. Mempertahankan kemantapan jalan sesuai Dengan umur rencana
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan jalan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan jalan

3.1.3 Struktur dan Deskripsi Dinas Bina Marga di Provinsi Jawa Barat

3.1.3.1 Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dinas Bina Marga di Provinsi Jawa Barat



Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Program, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang teknik, membawahi Seksi Rekayasa Teknik, Seksi Data Informasi dan Leger Jalan, dan Seksi Pengendalian Mutu
4. Bidang Pembangunan, membawahi Seksi Pengembangan Sistem Jaringan, Seksi Pembangunan Jalan dan Seksi Pembangunan Jembatan
5. Bidang Pemeliharaan dan Penanganan Bencana Alam, membawahi Seksi Peralatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pemeliharaan Jembatan
6. Bidang Pengawasan Pemanfaatan, membawahi Seksi Pengaturan, Seksi Pemanfaatan dan Seksi Pengendalian Pengawasan.

3.1.3.2 Deskripsi Jabatan Kepala Dinas, Sekertaris, Bidang Teknik, Bidang Pembangunan, Bidang Pemeliharaan dan Penanganan Bencana Alam, dan Bidang Pengawasan Pemanfaatan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekrtaris mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD, melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor, melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan, melaksanakan pemungutan

dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah, dan melaksanakan koordinasi penyusunan laporan. Sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas.

3. Bidang teknik

Bidang teknik mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan teknis bidang tata teknik, bina teknik, perancangan dan pengujian tanah dan bahan jalan. Bidang teknik membawahi:

- a. Seksi Rekayasa Teknik, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan teknis untuk evaluasi dan pelaporan.
- b. Seksi Data Informasi dan Leger Jalan, mempunyai tugas pokok mempersiapkan data dan informasi.
- c. Seksi Pengendalian Mutu, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum jasa pengujian dan penyelidikan

4. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyelenggaraan teknis bidang tata teknik pembangunan jalan dan

jembatan, pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan. Bidang pembangunan membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Jaringan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis pengembangan pembangunan.
- b. Seksi Pembangunan Jalan, mempunyai tugas pokok menyusun bahan penyelenggaraan teknik pelaksanaan pengawasan pembangunan dan penempatan jalan.
- c. Seksi Pembangunan Jembatan, mempunyai tugas pokok menyusun bahan penyelenggaraan teknik pelaksanaan pembangunan dan pengantian jembatan.

5. Bidang Pemeliharaan dan Penanganan Bencana Alam

Bidang pemeliharaan dan penanganan bencana alam mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan teknik pemeliharaan, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan. Bidang pemeliharaan pemeliharaan jembatan membawahi:

- a. Seksi Peralatan, mempunyai tugas mempersiapkan peralatan untuk pemeliharaan.
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan, mempunyai tugas mempunyai tugas pokok menyusun bahan penyelenggaraan teknis pemeliharaan jalan.
- c. Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas pokok menyusun bahan penyelenggaraan teknis pemeliharaan jembatan.

6. Bidang Pengawasan Pemanfaatan

Bidang pengawasan pemanfaatan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan di bidang pengawasan pemanfaatan jalan. Bidang pengawasan pemanfaatan membawahi:

- a. Seksi Pengaturan, mempunyai tugas pokok menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tata teknis pengawasan pemanfaatan tata naskah perizinan dan petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan.
- b. Seksi Pemanfaatan, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kajian dan petunjuk teknis pemanfaatan.
- c. Seksi Pengendalian Pengawasan, mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis pengawasan.

3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga di provinsi Jawa Barat

Secara umum, dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjabarkan tugas pokok dinas daerah tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan Tata kerja yang diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2009.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang bina marga

2. Penyelenggaraan bidang urusan bina marga meliputi: perencanaan dan penyusunan program, bidang teknik, pembangunan, pemeliharaan dan penanganan bencana alam dan pengawasan pemanfaatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kebinamargaan meliputi: perencanaan dan penyusunan program, bidang teknik, pembangunan, pemeliharaan dan penanganan bencana alam dan pengawasan pemanfaatan
4. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD
5. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2004:72) menyatakan bahwa populasi adalah sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu.”

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff Bagian keuangan yang berjumlah 112 orang yang berada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

3.2.2 Sampel Penelitian

Definisi sampel menurut Sugiyono (2004:73) adalah:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *non probability sampling*. Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (*representative*) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Tidak semua daerah atau kelompok populasi diteliti, cukup dua atau tiga daerah kelompok yang diambil sampelnya untuk diteliti.

Berdasarkan populasi diatas, peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua karyawan yang berada di Dinas Bina Marga. Namun, peneliti hanya mengambil sampel pada karyawan atau staff yang berada di bagian akuntansi atau keuangan saja. Hal itu dikarenakan judul penelitian ini mengacu kepada sistem akuntansi keuangan yang digunakan tentunya oleh bagian akuntansi atau keuangan di Dinas Bina Marga tersebut. Dari jumlah populasi sebanyak 112 orang peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden dari 4 bidang di bagian keuangan. Dari 30 kuisoner yang disebar ke 30 responden yang berada di Bagian staff akuntansi atau keuangan, hanya 25 kuisoner yang kembali dan dapat diolah untuk pengujian hipotesis.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory*, penelitian *explanatory* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Adapun pengertian *explanatory* sebagai berikut :

Menurut Sugiyono (2011:10) bahwa:

“Penelitian *explanatory* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis.”

Sedangkan metode survey menurut Nazir (2003) adalah :

“Suatu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara factual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survey membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah dan mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian *explanatory* analisis dengan pendekatan survey adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran keadaan yang terjadi secara nyata untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan sasaran.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan karyawan atau staaf di bagian akuntansi atau keuangan di Dinas Bina Marga. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang telah disusun sedemikian rupa untuk dijawab oleh responden, biasanya disertai alternatif-alternatif jawaban (Sekaran, 2006).

Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil angket yang telah diisi tersebut pada UMKM yang bersangkutan. Angket yang telah diisi oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu.

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2007:4). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Dinas Bina Maraga untuk tahun 2013. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpula data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugioyono, 2007:4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Bina Maraga untuk tahun 2013. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Penjabaran variabel ke dalam indikator-indikator yang akan mendasari penyusunan kuesioner dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Operasional Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Nomor Kuesioner
Variabel Independen Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X)	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuain sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP)2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standat pencatan akuntansi pada umumnya3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik	Ordinal	1 2 s/d 6 7 s/d 10
Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi kriteria dari sebuah laporan keuangan yang kualitatif dengan karakteristik yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.	Ordinal	1 s/d 11

Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data–data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah *Summated Rating Method: Likert Scale* atau skala likert. Skala likert merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala ordinal. Alasan penggunaan teknik pengukuran skala likert adalah karena teknik ini tidak menuntut penggunaan kategori dan subjek yang di ukur tidak terbatas kepada dua alternatif jawaban saja.

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban–jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban, sebagai berikut :

- Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
- Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
- Skor 3 untuk jawaban Kurang setuju (KS)
- Skor 2 untuk jawaban Tidak setuju (TS)
- Skor 1 untuk jawaban Sangat tidak setuju (STS)

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menunjukan masalah yang telah di rumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006). Alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Untuk menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan Rumus Koefisien Korelasi *Product Moments Pearson* sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah responden
- Y = Jumlah skor total seluruh item Y_i
- X = Jumlah skor tiap item X_i

Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian dihitung nilai t_{hitung} untuk menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah responden

Setelah nilai t_{hitung} diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t_{hitung} tersebut dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$. Kaidah keputusannya adalah :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid.

Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel sistem akuntansi keuangan

pemerintah daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah. Uji validitas terhadap item-item pernyataan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data *software* SPSS Ver 19.

Namun dalam penelitian ini skala pengukuran untuk uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} atau nilai yang dihasilkan pada uji reabilitas yaitu pada kolom Correlation Item-Total Correlation dengan nilai yang dihasilkan r_{tabel} . Berdasarkan perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} maka terbentuklah hipotesis, sebagai berikut :

Ho : $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada kuisisioner dinyatakan valid.

Ha : $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada kuisisioner dinyatakan tidak valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2006).

Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Koefisien *Alpha Cronbach* ditunjukkan dengan :

$$\text{Alpha } (\alpha) = \frac{k \cdot \bar{r}}{1 + (k - 1) \cdot \bar{r}}$$

Keterangan :

k = Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten

\bar{r} = Rata-rata korelasi antar variabel manifes

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. Makin besar nilai koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat konsistensi jawaban.

- Jika $r < 0,20$ maka tingkat keandalan sangat lemah atau tingkat keandalan tidak berarti.
- Jika r diantara $0,20 - 0,40$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang rendah tetapi pasti.
- Jika r diantara $0,40 - 0,70$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang cukup berarti.
- Jika r diantara $0,70 - 0,90$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang tinggi.
- Jika $r > 0,90$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi.

Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah. Uji reliabilitas terhadap variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data *software* SPSS Ver 19.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisis Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). Kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$r_s = \frac{1 - 6 \sum d_i^2}{n^3 - n}$$

Dengan ketentuan:

r_s = koefisien korelasi *Rank Spearman*

d_i = selisih *rank* X dengan *rank* Y yang ke- i

n = jumlah sampel

6 = Besaran sampel (konstanta)

Nilai r_s (koefisien korelasi *rank spearman*) yang diperoleh akan berkisar antara 1,0 sampai +1. Notasi ini menunjukkan tingkat korelasi antara variabel-variabel yang diuji, yaitu:

- 1) Bila $r_s = -1$ berarti terdapat korelasi yang kuat tetapi merupakan korelasi negatif atau berlawanan arah (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya)
- 2) Bila $r_s = 0$ berarti terdapat korelasi antara variabel-variabel yang diuji atau korelasi yang lemah dan tidak ada hubungan.
- 3) Bila $r_s = 1$ berarti terdapat korelasi yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan nilai positif atau searah (jika X naik maka Y naik atau sebaliknya).

Jika dalam perhitungan hubungan terdapat dua subjek atau lebih yang mendapatkan skor pada variabel yang sama, masing-masing akan mendapatkan rata-rata rangking sehingga terdapat rangking kembar. Jika proporsi rangking kembar yang terjadi tidak besar, maka akibatnya pada r , dapat diabaikan. Tetapi apabila proporsi rangking kembar yang terjadi cukup besar, maka dalam perhitungan korelasi adalah sebagai berikut :

$$T = \frac{t^2 - t}{12}$$

Keterangan : t = Jumlah data variabel yang memilih rank yang sama

Besarnya r menunjukkan jumlah variasi nilai T dari semua kelompok nilai kembar, sehingga perhitungan hubungan korelasi r , menjadi :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum X^2 \cdot \sum Y^2}}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\sum X^2 = \frac{n^2 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum Y^2 = \frac{n^2 - n}{12} - \sum T_y$$

Keterangan :

r_s = Koefisien korelasi Rank Spearman

d_i = Selisih Rank x dan Rank y

n = Jumlah sampel

T_x = Faktor korelasi x

T_y = Faktor korelasi y

Analisis kuat lemahnya koefisien korekasi ini menurut Sugiyono (2005), dapat digunakan sebagai pedoman seperti yang tertera pada tabel; 3.2:

Tabel 3.2
Koefisien Korelasi dan Taksiran

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20- 0,399	Rendah
0,40- 0,599	Sedang
0,60- 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

Sumber : sugiyono (2005)

3.6.2 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya dari pengaruh variabel bebas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Kd = r_s^2 \times 100\%$$

keterangan:

Kd = koefisien determinasi

r_s = Koefisien korelasi *Rank Spearman*

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : r_s \leq 0$ menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_0 : r_s > 0$ menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengujian hipotesis ini menggunakan model statistik uji t, dengan rumus sebagai berikut :

$$t = r_s \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

Dimana:

r_s = koefisien korelasi spearman

n = Banyaknya sampel

Dengan ketentuan :

$\alpha = 0,05$

$Df = n-(k+1)$

Dimana :

n = Jumlah data responden

k = Variabel independent

1 = Variabel dependent

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan suatu perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} yang

terdapat dalam tabel distribusi t atau lazim disebut t_{tabel} . Adapun taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n - 2$.

Ketentuan penerimaan atau penolakan pernyataan, yaitu :

- 1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
artinya ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
artinya tidak ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan hasil survey yang telah diperoleh. Data yang diperoleh harus diolah terlebih dahulu agar dapat dianalisis dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Objek dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang ada pada bagian keuangan atau akuntansi di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Jumlah responden yaitu sebanyak 25 responden. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari: masa bekerja, jenis kelamin dan jenjang usia.

Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Profil Responden dan Hasil Penyebaran Kuisisioner

NAMA PERUSAHAAN RESPONDEN	Kuisisioner yang Disebar	Kuisisioner yang Kembali	Kuisisioner yang Dapat Diolah
Dinas Bina Marga	30	30	25

Tabel 4.2

Kelompok Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Masa Bekerja	Frekuensi	Presentase
1-10Tahun	5	20%
11-20Tahun	14	56%
21-30Tahun	4	16%
>30Tahun	2	8%
Total	25	100%

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa masa bekerja 11-20 tahun merupakan responden terbanyak dalam penelitian yaitu sebesar 56% sedangkan terendah yaitu yang masa bekerja >30 tahun yaitu 8%.

Tabel 4.3

Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

JenisKelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	21	84%
Wanita	4	16%
Total	25	100%

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden Jenis Kelamin pria lebih besar yaitu 84% dibandingkan dengan wanita yang hanya sebesar 16%.

Tabel 4.4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Usia

JenjangUsia	Frekuensi	Persentase
20 – 30	2	8%
31 – 40	6	24%
41 – 50	11	44%
>50	6	24%
Total	25	100%

Sumber : data primer yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 dari 25 responden yang menjadi objek penelitian, terlihat responden dengan jenjang usia 41-50 lebih banyak yaitu 44% sedangkan jenjang usia paling sedikit adalah 20-30 yaitu 2%.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.2.1 Gambaran Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Daerah

Variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Variabel sistem akuntansi keuangan pemerintan

daerah terdiri dari 10 butir pertanyaan dari 3 indikator yaitu kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standat pencatan akuntansi pada umumnya, pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.

a) Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Karena sistem akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5

Gambaran Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Item Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor Akruai	Skor Ideal	%	Mean Skor
			SS	S	KS	TS	STS				
1	Sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	F	10	15	0	0	0	110	125	88,0%	4,4
		%	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0				
Akumulasi Jawaban		F	10	15	0	0	0	110	125	88,0%	4,4
		%	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0				

Untuk mengkatagorikan bagaimana gambaran mengenai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, maka penulis membuat pengkatagorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 25 orang responden

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor Minimum} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \\ &= 5 \end{aligned}$$

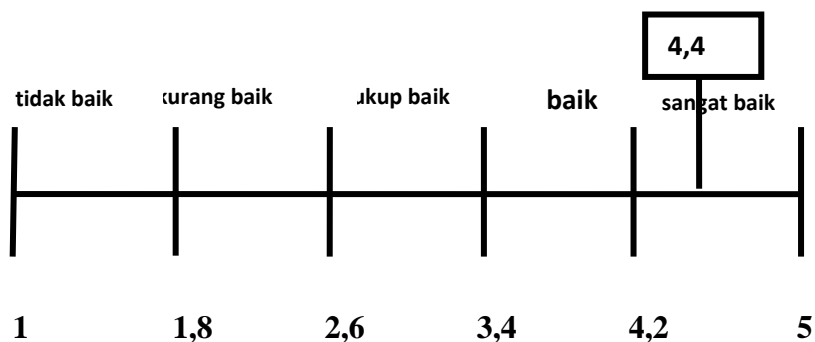
$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai Indeks Maksimum} - \text{Nilai Indeks Minimum} \\ &= 5 - 1 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval} : \text{Jenjang} (5) \\ &= 4 : 5 = 0,8 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 0,8 pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut :

Gambar 4.1

Garis Kontinum mengenai kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan



Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 4.1, jumlah skor total tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari 1 pernyataan diperoleh total skor aktual 110 dan total skor ideal 125 dengan persentase 88% dan rata-rata skor sebesar 4,4. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b) Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum

Prosedur pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6

**Gambaran Mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi Dengan Standar
Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum**

No	Item Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor
			SS	S	KS	TS	STS				
2	Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi	F	8	17	0	0	0	108	125	86,4%	4,3
		%	32,0	68,0	0,0	0,0	0,0				
3	Pada Dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.	F	7	18	0	0	0	107	125	85,6%	4,3
		%	28,0	72,0	0,0	0,0	0,0				
4	Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini didukung oleh bukti transaksi	F	10	15	0	0	0	110	125	88,0%	4,4
		%	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0				
5	Pada Dinas ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis	F	6	19	0	0	0	106	125	84,8%	4,2
		%	24,0	76,0	0,0	0,0	0,0				
6	Pada Dinas ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi	F	7	17	1	0	0	106	125	84,8%	4,2
		%	28,0	68,0	4,0	0,0	0,0				
Akumulasi Jawaban			38	86	1	0	0	537	625	85,9 %	4,3

Untuk mengkatagorikan bagaimana gambaran prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum, maka penulis membuat pengkatagorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 25 orang responden

Nilai Indeks Minimum = Skor Minimum
= 1

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \\ &= 5 \end{aligned}$$

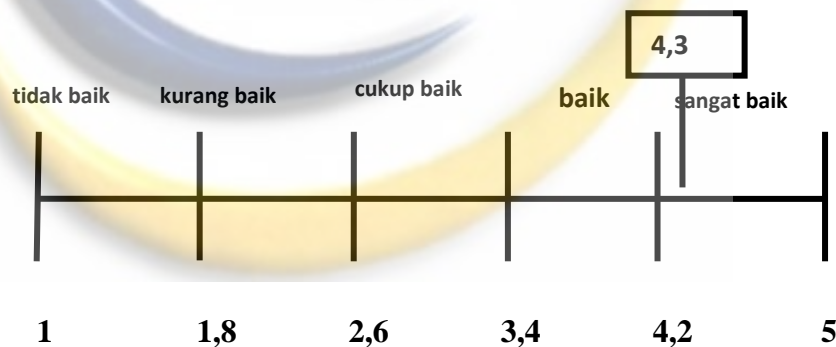
$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai Indeks Maksimum} - \text{Nilai Indeks Minimum} \\ &= 5 - 1 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval} : \text{Jenjang (5)} \\ &= 4 : 5 = 0,8 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 0,8 pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut :

Gambar 4.2

Garis Kontinum mengenai Mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan dengan Standar Pencatatan Akuntansi yang Berlaku Umum



Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 4.2, jumlah skor total tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum dari 5 pertanyaan diperoleh total skor aktual 537 dan total skor ideal 625 dengan persentase 85,9% dan rata-rata skor sebesar 4,3. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan

bahwa tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi di Dinas Bina Marga sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

c) Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodek dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik, maka dapat diliha pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7

Gambaran Mengenai Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik

No	Item Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor Akrual	Skor Ideal	%	Mean Skor
			SS	S	KS	TS	STS				
7	Pada Dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya	F	10	15	0	0	0	110	125	88,0%	4,4
		%	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0				
8	Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan	F	10	15	0	0	0	110	125	88,8%	4,4
		%	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0				
9	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi	F	8	16	1	0	0	107	125	85,6%	4,3
		%	32,0	64,0	4,0	0,0	0,0				
10	Pelaporan laporan	F	9	16	0	0	0	109	125	87,2%	4,4

keuangan dilakukan secara konsisten dan periodic	%	36,0	64,0	0,0	0,0	0,0				
Akumulasi Jawaban		37	62	1	0	0	436	500	87,2	4,4
									%	

Untuk mengkatagorikan bagaimana gambaran mengenai mengenai pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik, maka penulis membuat pengkatagorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 25 orang responden

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor Minimum} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \\ &= 5 \end{aligned}$$

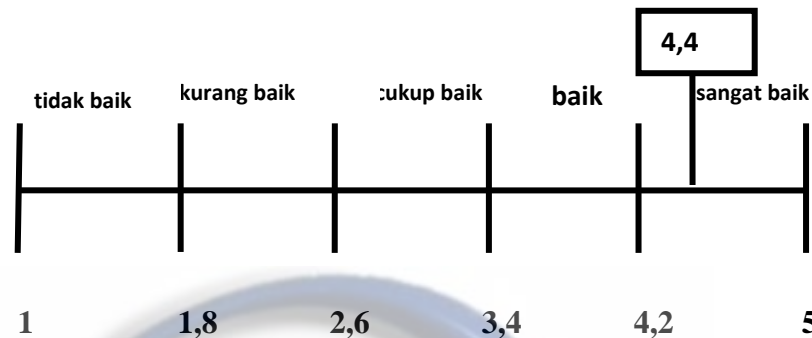
$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai Indeks Maksimum} - \text{Nilai Indeks Minimum} \\ &= 5 - 1 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval} : \text{Jenjang (5)} \\ &= 4 : 5 = 0,8 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 0,8 pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut :

Gambar 4.3

Garis Kontinum pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik



Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 4.3, jumlah skor total tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik dari 4 pertanyaan diperoleh total skor aktual 436 dan total skor ideal 500 dengan persentase 87,2% dan rata-rata skor sebesar 4,4. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan laporan keuangan di Dinas Bina Marga sudah sesuai dan dilakukan secara periodik.

4.1.2.2 Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah terdiri dari 11 butir pertanyaan dari 1 indikator yaitu laporan keuangan yang disusun sudah

memenuhi kriteria dari sebuah laporan keuangan yang kualitatif dengan karakteristik yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

a) Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai laporan keuangan harus andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8

Gambaran Mengenai Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami

No	Item Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor
			SS	S	KS	TS	STS				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu	F	8	14	3	0	0	105	125	84,0%	4,2
		%	32,0	56,0	12,0	0,0	0,0				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang	F	2	18	5	0	0	97	125	77,6%	3,9
		%	8,0	72,0	20,0	0,0	0,0				
3	Penyajian/penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi	F	8	14	3	0	0	105	125	84,0%	4,2
		%	32,0	56,0	12,0	0,0	0,0				
4	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan	F	7	16	2	0	0	105	125	84,0%	4,2
		%	28,0	64,0	8,0	0,0	0,0				
5	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan	F	9	14	2	0	0	107	125	85,6%	4,3
		%	36,0	56,0	8,0	0,0	0,0				
6	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda	F	0	11	6	7	1	77	125	61,6%	3,1
		%	0,0	44,0	24,0	28,0	4,0				
7	Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu	F	0	13	5	3	4	77	125	61,6%	3,1
		%	0,0	52,0	20,0	12,0	16,0				

8	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	F	7	13	4	1	0	101	125	80,8%	4,1
		%	28,0	52,0	16,0	4,0	0,0				
9	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama	F	3	14	5	3	0	92	125	73,6%	3,7
		%	12,0	56,0	20,0	12,0	0,0				
10	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas	F	6	18	1	0	0	105	125	84,0	4,2
		%	24,0	72,0	4,0	0,0	0,0				
11	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	F	8	16	1	0	0	107	125	85,6%	4,3
		%	32,0	64,0	4,0	0,0	0,0				
Akumulasi Jawaban			58	161	37	14	5	1078	1375	78,4 %	3,9

Untuk mengkatagorikan bagaimana gambaran laporan keuangan harus andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, maka penulis membuat pengkatagorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 25 orang responden

Nilai Indeks Minimum = Skor Minimum
= 1

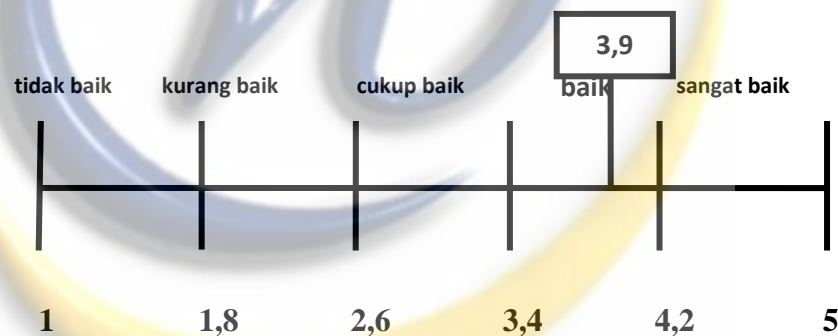
Nilai Indeks Maksimum = Skor Maksimum
= 5

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai Indeks Maksimum} - \text{Nilai Indeks Minimum} \\ &= 5 - 1 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval} : \text{Jenjang (5)} \\ &= 4 : 5 = 0,8 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 0,8 pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai laporan keuangan harus andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut :

Gambar 4.4
Garis Kontinum mengenai Laporan Keuangan Harus Andal, relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami



Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 4.4, jumlah skor total tanggapan responden tentang laporan keuangan harus andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dari 11 pertanyaan diperoleh total skor aktual 1078 dan total skor ideal 1375 dengan persentase 78,4% dan rata-rata skor sebesar 3,9. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang laporan keuangan harus andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami adalah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan

yang di buat oleh Dinas Bina Marga sudah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

4.1.3 Analisis Jawaban Responden

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Kuisioner terdiri dari 21 butir pernyataan dengan perincian 10 butir pernyataan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan 11 butir pernyataan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas serta analisis korelasi *Rank Spearman* dan pengujian hipotesis untuk pengambilan keputusan.

Opsinya untuk menentukan bobot dari setiap jawaban yang diberikan responden akan diberikan skor (nilai) pada setiap jawaban yaitu arah pernyataan untuk pernyataan positif akan diberi skor 5-4-3-2-1 dengan menggunakan skala likert yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan
 - Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
 - Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
 - Skor 3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS)

- Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
- Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

4.1.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan berupa butir item pernyataan yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

4.1.4.1 Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang telah diterapkan dalam kuisioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel, apabila R hitung > R tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuisioner dari variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

BUTIR PERTANYAAN	R Hitung	R Tabel	KETERANGAN
PSA1	,579	0,396	VALID
PSA2	,841	0,396	VALID
PSA3	,657	0,396	VALID
PSA4	,881	0,396	VALID
PSA5	,745	0,396	VALID
PSA6	,702	0,396	VALID
PSA7	,686	0,396	VALID
PSA8	,552	0,396	VALID
PSA9	,607	0,396	VALID
PSA10	,715	0,396	VALID

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tersebut valid. Sedangkan untuk hasil pengujian atas variabel kualitas laporan keuangan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BUTIR PERTANYAAN	R Hitung	R Tabel	KETERANGAN
KLK1	,444	0,396	VALID
sKLK2	,572	0,396	VALID
KLK3	,610	0,396	VALID
KLK4	,554	0,396	VALID
KLK5	,429	0,396	VALID
KLK6	,570	0,396	VALID
KLK7	,469	0,396	VALID
KLK8	,585	0,396	VALID
KLK9	,570	0,396	VALID
KLK10	,450	0,396	VALID
KLK11	,420	0,396	VALID

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan diperoleh kesimpulan bahwa pertanyaan dalam kuisisioner tersebut valid.

4.1.4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan suatu variabel dan disusun dalam satu bentuk kuisisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel.

4.1.4.2.1 Reliabilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4.11
Realibilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,918	,919	10

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel di atas nilai reliabilitas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sebesar 0,919 nilai ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi karena $r > 0,90$ sehingga variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria reliabel.

4.1.4.2.2 Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4.12
Realibilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,820	,849	11

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel di atas nilai reliabilitas kualitas laporan keuangan 0,849 nilai ini $0,70 < 0,849 < 0,90$ termasuk memiliki tingkat keandalan tinggi sehingga variabel kualitas laporan keuangan sudah memenuhi kriteria reliabel.

4.1.5 Analisis Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). Kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal.

Tabel 4.13
Analisis Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Correlations

			Rank of X	Rank of Y
Spearman's rho	Rank of X	Correlation Coefficient	1,000	,506**
		Sig. (2-tailed)	.	,010
		N	25	25
	Rank of Y	Correlation Coefficient	,506**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,010	.
		N	25	25

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari Tabel 4.13 diatas diketahui nilai koefisien korelasi *Rank Spearman* sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$, serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya (sugiyono:2005)

4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya dari pengaruh variabel bebas (sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan).

Koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,506^2 \times 100\%$$

$$= 25,6 \%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya 25.6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini .

4.1.7 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat dilakukan suatu perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} yang terdapat dalam tabel distribusi t. Adapun taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n - 2$.

Pengujian hipotesis ini menggunakan model statistik uji t, untuk mengetahui t_{hitung} dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = r_s \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

$$t = 0,506 \frac{\sqrt{25-2}}{\sqrt{1-0,506^2}}$$

$$t = 2,818 \text{ (t hitung)}$$

dan untuk pengujian t_{tabel} diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= t(\alpha; df) \\ &= (0,05; 23) \\ &= 2,068 \text{ (t tabel)} \end{aligned}$$

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah kualitas laporan keuangan.

Dari hasil pengujian t_{hitung} diatas didapat nilai 2,818 dimana t_{tabel} 2,068, sehingga t_{hitung} 2,818 > 2,068 t_{tabel} dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan pembahasan mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat baik sebagai berikut :

4.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Bina Marga

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem akuntansi Pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem

akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam 3 indikator yang terdiri dari:

1) Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Karena sistem akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 4.1, jumlah skor total tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari 1 pernyataan diperoleh total skor aktual 110 dan total skor ideal 125 dengan persentase 88% dan rata-rata skor sebesar 4,4. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2) Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum

Prosedur pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 4.2, jumlah skor total tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum dari 5 pertanyaan diperoleh total skor aktual 537 dan total skor ideal 625 dengan persentase 85,9% dan rata-rata skor sebesar 4,3. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi di Dinas Bina Marga sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

3) Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodek dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 4.3, jumlah skor total tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik dari 4 pertanyaan diperoleh total skor aktual 436 dan total skor ideal 500 dengan persentase 87,2% dan rata-rata skor sebesar 4,4. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan

laporan keuangan di Dinas Bina Marga sudah sesuai dan dilakukan secara periodik.

4.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Bina Marga

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam 1 indikator yaitu :

1) Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

a). Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi mendapatkan nilai sebesar 3.5 dan berada pada garis kontinum baik, yang berarti laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sudah dikatakan baik karena sudah andal dalam penyajian yang jujur, kesalahan material, sesuai fakta dan dapat diverifikasi.

b). Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu mendapat nilai sebesar 4,1 dan berada pada garis kontinum baik, yang berarti kualitas laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sudah dapat dikatakan baik karena disajikan tepat waktu, sudah dapat membantu mengevaluasi kejadian di masa lalu serta membantu memprediksi kejadian di masa yang akan datang.

c). Dapat dibandingkan

Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama mendapat nilai sebesar 3.9 yang berada pada garis kontinum baik, berarti laporan keuangan pada Dinas Bina

Marga Provinsi Jawa Barat dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d). Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dan mendapat nilai sebesar 4,25 yang berada pada garis kontinum sangat baik. Berarti kualitas laporan keuangan pada dinas bina marga mampu untuk dipahami oleh para pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sudah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat maupun oleh pengguna eksternal.

4.2.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dapat dilihat pada pengujian hipotesis diatas taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n - 2$. menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,818, sedangkan untuk nilai t_{tabel} sebesar 2,068. Jika dilihat dari hasil perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , maka nilai t_{hitung} sebesar $2,818 > \text{nilai } t_{tabel} 2,068$. Dengan kata lain, apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengandung arti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roviyantje (2011) yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik. Namun hal ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik agar mampu mengoperasikan dan memahami sistem akuntansi keuangan yang digunakan. Laporan keuangan bukan hanya sekedar bentuk pertanggungjawaban saja, namun laporan keuangan juga dijadikan ukuran kinerja suatu instansi tersebut. Laporan keuangan juga dijadikan sebagai dasar bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, untuk

itu pentingnya kualitas laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat menunjang dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang sudah memenuhi kriteria relevan, handal, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 a) Simpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan Korelasi Rank Spearman dengan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19.00*. Subjek penelitian ini adalah Dinas Bina Marga di Kota Bandung tahun 2013. Dari total kuisisioner yang disebar sebanyak 30 kuisisioner dan kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 25 kuisisioner.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Metode Analisis Korelasi *Rank Spearman* dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam 3 indikator yang terdiri dari 10 pernyataan. Dari indikator kesatu menunjukkan hasil mean skor sebesar 4,4. Indikator kedua menunjukkan hasil mean skor sebesar 4,3. Sedangkan indikator

ketiga menunjukkan hasil mean skor 4,4. Dari ketiga indikator tersebut, nilai mean skor berada pada interval 4,2 – 5 yang berarti masuk ke dalam kategori sangat baik. Artinya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga mengenai standar akuntansi pemerintahan, proses pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta untuk hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat dilaporkan secara periodik. Secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga tergolong sangat baik.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga termasuk ke dalam kategori baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 1 indikator yang dan terbagi ke dalam 11 pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk laporan keuangan pemerintah daerah nilai mean skor sebesar 3,9 berada pada interval 3,4 – 4,2 dan termasuk ke dalam kategori baik. Artinya laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga sudah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Bina Marga merupakan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Berdasarkan hasil pengujian didapat nilai koefisien korelasi *Rank Spearman* sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s

0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$. Sedangkan berdasarkan hasil uji perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} didapat nilai t_{hitung} sebesar 2,818 dimana t_{tabel} 2,068, sehingga $t_{hitung} 2,818 > 2,068 t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b) Keterbatasan

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Pemilihan subjek penelitian hanya hanya terfokus pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung.
2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak diuji dalam penelitian ini, seperti sumber daya manusia dan lainnya.
3. selain itu kurangnya landasan teori dari para peneliti sebelumnya, dikarenakan judul ini masih jarang diteliti.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan ekuangan pemerintah daerah. Untuk itu khususnya pada Dinas Bina Marga yang

menjadi subjek dalam penelitian ini perlu memperhatikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, baik dalam memahami dalam penggunaannya ataupun dalam hal mengetahui pulsa standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pentingnya sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik dengan adanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang diterapkan pada Dinas Bina Marga.
3. Untuk peneliti berikutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak terbatas hanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun dapat menambah variabel independen lain yang mungkin memiliki pengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Selain itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terfokus pada satu Dinas seperti dalam penelitian ini yang terfokus hanya pada Dinas Bina Marga, namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa Dinas agar dapat menggambarkan secara umum dan luas mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hafiz Tanjung. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA.
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alam, S. 2004. *Akuntansi SMA untuk Kelas XI*. Jakarta: Esis.
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen, Penerbit*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2011, <http://www.bpk.go.id>, 2 Juni 2012.
- Fajar, Adrianus. 2010. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. (Tidak untuk dipublikasikan)
- Freeman, Robert J. 1998. *Governmental Nonprofit Accounting Theory and Practice*. New Jersey: Prentice-hall, Inc.
- Halim, Abdul. 2002. *Accounting Principles Board*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Harto, Tantriani Sukmaningrum Puji. 2010. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal akuntansi Pemerintah*.
- Jones, B.M.R. dan M.Pendlebury. 2000. *Public sector accounting*. 4th Ed. London: Pitman.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- La Midjan, dan Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi 1*. Edisi Keenam : Lembaga Informasi Akuntansi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .
- Peraturan Pemerintahan No.58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 59/PMK.06/2005) mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah..
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 34 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Bina Marga.
- Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Rohman, Abdul. 2009. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* .

- Romney, Marshall B., Stembart and Paul John. 2006. *Accounting Information System*. New Jersey : Prentice Hall.
- Roviyantie, Devi. 2011. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* .
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, Binsar. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. (Tidak untuk dipublikasikan)
- Siregar, Baldric. 2001. *Akuntansi Pemerintah Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Weygant, Jerry J., et al. (2005). *Accounting principles 7th Edition*. John wiley and Sons.



LAMPIRAN I

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,918	,919	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PSA1	38,9200	11,743	,579	,700	,916
PSA2	39,0000	11,083	,841	,950	,901
PSA3	39,0400	11,707	,657	,948	,911
PSA4	38,9200	10,827	,881	,912	,898
PSA5	39,0800	11,577	,745	,955	,907
PSA6	39,0800	11,243	,702	,966	,909
PSA7	38,9200	11,410	,686	,766	,910
PSA8	38,9200	11,827	,552	,830	,917
PSA9	39,0400	11,457	,607	,737	,915
PSA10	38,9600	11,373	,715	,899	,908

Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,820	,849	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KLK1	39,8800	22,860	,444	,777	,810
KLK2	40,2400	22,690	,572	,782	,803
KLK3	39,9600	21,707	,610	,845	,796
KLK4	39,9200	22,327	,554	,917	,802
KLK5	39,8800	22,943	,429	,907	,811
KLK6	40,8400	18,890	,570	,919	,802
KLK7	40,8000	19,167	,469	,916	,821
KLK8	40,1600	21,057	,585	,750	,796
KLK9	40,5200	20,760	,570	,739	,797
KLK10	39,8800	23,610	,450	,937	,812
KLK11	39,9200	23,827	,420	,948	,814

Koefesien Korelasi Rank Spearman

Correlations

			Rank of X	Rank of Y
Spearman's rho	Rank of X	Correlation Coefficient	1,000	,247
		Sig. (2-tailed)	.	,235
		N	25	25
	Rank of Y	Correlation Coefficient	,247	1,000
		Sig. (2-tailed)	,235	.
		N	25	25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Angga Dwi Permadi
Tempat / Tanggal Lahir : Rancaekek, 29 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Suling No.2 Flat It 3A RT 01/RW 02
Kel.Turangga Kec.Lengkong Bandung
Telepon / HP : 089697629033
E-mail : anggadpermadi@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Program Strata 1 (S-1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung (2009-2013)
- SMA Negeri 25 Bandung (2006-2009)
- SMP Negeri 20 Bandung (2003-2006)
- SD Kartika XI-XI (1997-2003)